

# Analisis Lingkungan Strategis Pulau Miangas, Pulau Terluar Indonesia Bagian Utara

Ice Fahmi<sup>1</sup>, Tri Soelistyo<sup>2</sup>, Muhammad Maulani<sup>3</sup>, Dessy Natalia<sup>4</sup>,  
Nugroho Adi Sasongko<sup>5</sup>, Donny Yoesgiantoro<sup>6</sup>

Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU<sup>123</sup>  
Universitas Pertahanan Republik Indonesia<sup>1456</sup>

email : kimiadislitbangau@gmail.com

**Abstract** — For an archipelagic country like Indonesia, the islands on the border have a very important role. Based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea Article 47 paragraph 1, an archipelagic state has the right to draw archipelagic baselines as a basis for measuring its territorial waters from the outermost points of its outermost islands. In other words, these small islands also determine the boundaries of the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. If Miangas Island is separated from the Unitary State of the Republic of Indonesia, the Indonesian nation will lose its vast sea area and the wealth contained therein. The government also sees threats in the form of Indonesia's concerns about changes in the orientation of Miangas residents, and opportunities in the form of new Indonesian tourism destinations. Therefore, the Government issued a policy related to the development of the outer islands of Indonesia as a national home page. In addition, the Government of Indonesia is also carrying out development in the northern border region to protect and maintain Indonesia's strategic environment from a military, political, economic and social perspective in order to fulfill Indonesia's national interests.

**Keyword:** Miangas; Archipelagic Country; National Defense.

**Abstrak** — Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, pulau-pulau di perbatasan memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 pasal 47 ayat 1, negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar pulau-pulau terluarnya. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil ini turut menentukan batas-batas kedaulatan NKRI. Apabila Pulau Miangas lepas dari NKRI, maka Bangsa Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang luas berikut sumber daya yang terkandung di dalamnya. Pemerintah juga telah melihat ancaman berupa kekhawatiran Indonesia akan perubahan orientasi warga Miangas, dan peluang berupa destinasi baru untuk pariwisata Indonesia. Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan pulau terluar Indonesia sebagai beranda negara. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan pengembangan di wilayah perbatasan utara tersebut untuk melindungi dan menjaga lingkungan strategis Indonesia baik dalam aspek militer, politik, ekonomi dan sosial demi memenuhi kepentingan nasional Indonesia

**Kata Kunci:** Miangas; Negara Kepulauan; Pertahanan Nasional.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di garis khatulistiwa. Letak geografis Indonesia membentang pada koordinat 6 LU - 11.08' LS dan 95 BT - 141.45' BT dan berada di antara benua Asia di utara, dan Australia di selatan. Indonesia juga berada diantara Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di barat. Karena letak geografis yang berada di antara dua benua dan samudra, Indonesia disebut sebagai Nusantara (Kepulauan Antara) (KKP, 2022). Dalam perspektif geopolitik, bentangan posisi geografis ini tentu saja menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki *bargaining Opower* dan *bargaining position strategis* dalam hubungan antar bangsa, baik dalam lingkup kawasan maupun global. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa ruang merupakan inti dari geopolitik yang merupakan wadah dinamika politik dan militer (Cohen, 2001).

Sementara itu, dalam hubungan antar negara, kompetisi dan kerja sama senantiasa menjadi jalan untuk mencapai kepentingan

nasional negara melalui potensi kekuatan yang ada, dengan melihat lingkungan strategis negaranya. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia masih kurang memerhatikan wilayah perbatasan negaranya. Padahal wilayah perbatasan merupakan bagian dari lingkungan strategis suatu negara, karena wilayah perbatasan berkaitan erat dengan kedaulatan negara itu sendiri. Pulau Miangas yang menjadi wilayah perbatasan antara Indonesia-Filipina merupakan pulau terluar Indonesia di bagian utara. Semestinya Pulau Miangas menjadi wilayah yang maju karena menjadi wilayah perbatasan dan gerbang ke kawasan regional, khusus nya Asia Pasifik. Akan tetapi, realita yang ada menunjukkan bahwa Pulau Miangas masih menjadi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Indonesia. Namun demikian, Pemerintah Indonesia kini sudah mulai memerhatikan Pulau Miangas dan memandang Pulau Miangas sebagai aset penting bagi bangsa Indonesia.

## PERMASALAHAN

Lingkungan strategis merupakan wilayah di sekitar satu negara yang akan menciptakan peluang dan ancaman dari negara-negara disekitarnya, dengan tujuan memenuhi kepentingan nasional negaranya. Ini dapat berada dalam skala yang lebih besar atau lebih kecil dan pada keadaan yang dinamis atau kacau sekalipun. Selain itu, lingkungan strategis juga dapat dipengaruhi oleh pertahanan nasional dan kondisi eksternal negara.

Menurut W. Michael Guilliot, lingkungan strategis sebuah negara akan terakait dengan keamanan bernegara yang menekankan pada pentingnya analisis bidang politik dan militer. Sementara menurut Libor Frank, lingkungan strategis merupakan

suatu lingkungan dan luar yang berdampak pada kebijakan keamanan, yaitu sebuah area di mana kepentingan nasional yang diimplementasikan akan berhadapan langsung dengan kepentingan nasional aktor-aktor lainnya, dan secara substansial dapat memengaruhi level keamanan nasional (Banjarnahor, 2013).

Lebihlanjut, lingkunganstrategissendiridapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu *immediate security* (perbatasan negara), *close security* (regional) dan *wide security* (global). Adapun isu yang termasuk ke dalam lingkungan strategis antara lain isu terkait lingkungan *Sustainable Finance Actiono Council* (SFAC), modernisasi militer negara-negara di sekitar kawasan, isu perbatasan, konflik intra dan

antar negara, konflik kontemporer, adanya ancaman terkait senjata penghancur massa, perang *Asymetrix*, kemungkinan perang di masa depan, spionase, organisasi kejahatan transnasional, perubahan iklim, wilayah rentan bencana, keamanan pangan, lingkungan keamanan nasional, dan tantangan di masa depan. Sementara itu, dalam kajian lingkungan strategis satu negara, penting untuk memerhatikan lingkungan keamanan, baik itu dalam aspek militer, politik, ekonomi maupun sosial. Karena keamanan keempat aspek tersebut dapat menunjang postur pertahanan lingkungan strategis satu negara.

Dalam hal ini, Pulau Miangas menjadi isu penting lingkungan strategis terkait keamanan perbatasan. Di mana keamanan militer, politik, ekonomi, dan sosial di Pulau Miangas menjadi variabel penting dalam menjaga lingkungan strategis Indonesia. Pulau Miangas memang telah menjadi tempat strategis sejak beberapa abad lalu. Karena pulau ini sempat menjadi tempat penyerbuan para perompak dan perebutan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Spanyol dan Belanda. Pulau Miangas juga menjadi bagian

penting dari perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika suku Talaud yang mendiami Pulau Miangas berhasil melawan penjajahan Belanda.

Sementara itu, bagi negara kepulauan seperti Indonesia, pulau-pulau di perbatasan memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 pasal 47 ayat 1, negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar pulau-pulau terluarnya. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil ini turut menentukan batas-batas kedaulatan NKRI. Apabila Pulau Miangas lepas dari NKRI, maka Bangsa Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang luas berikut sumber daya yang terkandung di dalamnya (Raharjo, 2012).

Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan wilayah lingkungan strategis bangsa Indonesia, termasuk di antaranya adalah Pulau Miangas yang berada di utara terluar Indonesia.

## PEMBAHASAN

Indonesia dan Filipina memang tidak pernah bersengketa atas Pulau Miangas. Karena sejak Indonesia merdeka, kedua negara telah menandatangani perjanjian persahabatan damai dan kerja sama dalam berbagai bidang. Termasuk di dalamnya masalah perbatasan dua negara (Ikanubun, 2017). Di mana pasca kemerdekaan masing-masing negara, keputusan Arbitrase Internasional terkait Pulau Miangas tetap dipegang teguh oleh kedua negara, baik Indonesia maupun Filipina. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Perjanjian Lintas Batas atau *Border Crossing Agreement* antara Indonesia dan Filipina yang ditanda tangani pada tahun 1956. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara mengakui bahwa Pulau Miangas adalah pos lintas batas

di pihak Indonesia. Lebih lanjut, Keputusan Arbitrase Internasional tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dua orang pakar hukum internasional, yaitu Willem Johan Bernard Versfelt dan Daniel-Eramus Khan (Kemendikbud, 2022).

Akan tetapi perkembangan aspek sosial yang ada di Pulau Miangas menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia. Karena Pulau Miangas memiliki jarak yang lebih dekat dengan Filipina dan hubungan komunikasi antara masyarakat wilayah perbatasan dapat memberikan ancaman kedaulatan bagi Indonesia. Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan perlarangan lintas negara dikarenakan ketakutan Indonesia yang berlebihan, mengingat Indonesia

pernah melepaskan Sipadan-Ligitan kepada Malaysia.

Pemerintah Indonesia memang telah melakukan banyak program pembangunan di Miangas, baik dalam bidang tata Pemerintahan, pertahanan keamanan dan ekonomi. Dalam tata Pemerintahan, Miangas telah menjadi satu kecamatan khusus yang terpisah dari Kecamatan Natuna yang sebelumnya menaungi Miangas. Pemisahan kecamatan tersebut dilakukan untuk memudahkan pengurusan dokumen-dokumen ke Pemerintahan, mengingat jarak Miangas yang cukup jauh dengan Kecamatan Natuna dan ibukota provinsinya. Dalam bidang pertahanan keamanan, Pemerintah telah menyediakan pos TNI AD, TNI AL, dan Polsek dengan personel yang memadai untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan pulau. Dalam bidang ekonomi, Pemerintah telah membangun pasar, bank, serta kantor pelabuhan. Akan tetapi pembangunan ekonomi tersebut hanya berupa infrastruktur tanpa di dukung dengan adanya para petugas yang mengelola bidang tersebut. Sehingga hal tersebut berdampak pada perekonomian warga Miangas yang hanya mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Sementara itu, kesejahteraan di Miangas semakin sulit semenjak jalur pelayaran Miangas dan Dafau (Filipina) dilarang oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Ditambah dengan kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai serta jarak tempuh yang cukup jauh. Jarak Miangas ke Kabupaten Kepulauan Talaud sendiri membutuhkan waktu sehari semalam menggunakan kapal perintis, sedangkan jarak ke Dafau (Filipina) hanya membutuhkan waktu sekitar tiga jam dengan kapal tradisional. Kebijakan perlarangan lintas negara tersebut berakibat pada aktivitas ekonomi yang biasanya dilakukan warga Miangas-Dafau untuk memenuhi kebutuhan pokok warga Miangas.

Hal ini berhubungan dengan kekhawatiran Pemerintah terkait kedekatan jarak Miangas

dan Filipina yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia atas batas wilayahnya. Ancaman yang mungkin terjadi ialah perubahan orientasi warga Miangas terhadap Indonesia, yaitu ketika warga Miangas menganggap bahwa Filipina lebih dekat dan peduli kepada Miangas dibandingkan dengan Indonesia. Kekhawatiran Indonesia juga diperkuat dengan berkembangnya isu-isu negatif seputar Miangas di Internet. Isu-isu tersebut menyebutkan bahwa warga Miangas menggunakan bahasa Tagalog, mata uang Peso serta produk-produk Filipina dalam kesehariannya. Bahkan beredar isu bahwa warga Miangas tengah memajang foto presiden Filipina di rumah-rumah mereka. Faktanya isu-isu tersebut hanyalah kabar burung yang berkembang di masyarakat, dan tidak sesuai dengan realita yang ada di Miangas. Warga Miangas masih menggunakan bahasa Talaud dan Indonesia, mata uang Rupiah dan produk-produk lokal dalam kesehariannya. Namun, kini Pemerintah sudah mulai memperhatikan dan memandang pentingnya pulau Miangas sebagai wilayah terdepan Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tekadnya “membangun dari pinggir” dengan prinsip Nawacita telah mulai memberikan pembuktiannya bagi warga Miangas. Presiden Joko Widodo telah meresmikan Bandara Miangas senilai Rp320 miliar pada 19 Oktober 2016. Dengan adanya peresmian Bandara Miangas, masyarakat dapat memiliki moda transportasi tambahan yang lebih memadai, mengingat selama ini masyarakat sangat bergantung pada transportasi laut seperti kapal perintis. Kini masyarakat dapat berbelanja kebutuhan pokok mereka di Bitung atau Tahuna dengan menggunakan pesawat terbang, meskipun itu hanya sekali dalam seminggu. Di sisi lain, hal ini juga meringankan jarak tempuh warga Miangas ke wilayah Indonesia lainnya, yang kelak akan berdampak pada kesejahteraan warga Pulau Miangas. Sehingga warga Miangas tidak lagi merasa diasingkan dari negaranya sendiri (Yayasan BUMN, 2022).

Kemudian pada saat peresmian Bandara Miangas, Presiden Jokowi menegaskan tekad Pemerintah Indonesia untuk menjadikan pulau terdempannya sebagai beranda Indonesia dan bukan sekadar halaman belakang saja. Dimana pembangunan Bandar Udara Miangas sendiri yang berjumlah Rp205 miliar, berasal dari dana APBN. Lebih lanjut, kehadiran Bandara Miangas telah meningkatkan sejumlah proyek infrastruktur yang berada di pulau terluar Indonesia tersebut. Salah satunya adalah rehabilitasi yang dilakukan oleh Yayasan BUMN untuk sekolah dasar (SD) Negeri Miangas pada Agustus 2019. SD tersebut memiliki kondisi sangat memprihatkan, dengan atap bocor yang membuat para murid harus mencari tempat berteduh guna menghindari jatuhnya air hujan (Yayasan BUMN, 2022).

Selain peresmian Bandara Miangas dan rehabilitasi bangunan sekolah, Pemerintah juga melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah meratifikasi Undang-undang mengenai persetujuan batas ZonabEkonomi Eksklusif Indonesia-Filipina pada tanggal 27 April 2017. Lebih lanjut, Indonesia juga dapat menjadikan Miangas sebagai lingkungan strategis dalam bidang pariwisata. Mengingat Pulau Miangas memiliki keasrian, keindahan, dan keeksotisan yang dapat memanjakan para wisatawan. Pembukaan Bandar Udara Miangas dapat menjadikan pulau seluas 3,5 km<sup>2</sup> tersebut lebih mudah untuk dikunjungi oleh wisatawan. Mengingat sebelumnya wisatawan yang ingin berkunjung ke Miangas perlu menempuh perjalanan laut yang cukup panjang, belum lagi dengan gelombang laut yang dapat membahayakan kapal. Kini dengan keberadaan Bandar Udara Miangas, pelancong dapat menempuh perjalanan dari Jakarta ke Miangas dengan waktu sekitar 5 jam melalui udara (Yayasan BUMN, 2022).

Pulau Miangas memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa dengan pantai-pantai pasir putih nan cantik yang mengelilinginya. Begitu juga dengan perairan lautnya yang sangat jernih dan memesona, di mana ikan-ikan dapat terlihat dengan jelas berenang di laut lepas. Semua hal tersebut tentu dapat menjadi daya tarik unik Miangas bagi para turis lokal dan global. Akan tetapi, kearifan lokal Miangas tetap harus terjaga dalam memanfaatkan keindahan alam Miangas. Sehingga kekhawatiran terkait isu perubahan orientasi warga Miangas dapat diatasi. Namun perlu diperhatikan bahwa pengurangan kekhawatiran Indonesia terhadap Miangas tidak berarti pengurangan pertahanan keamanan di Miangas.

Penjagaan pulau dan perairan di sekitar Miangas tentu menjadi hal penting bagi Indonesia. Menurut data dan informasi yang diperoleh oleh Media Indonesia pada Desember 2020 lalu, TNI AL di Melonguane melaksanakan tiga fungsi untuk menjaga keamanan perbatasan di sekitar Miangas, yaitu penangkalan, penindakan, dan pemulihan terhadap segala ancaman yang mungkin terjadi di wilayah NKRI, terutamanya di perbatasan. Di sisi lain, TNI juga merubah paradigma politik di perbatasan dari pendekatan keamanan konvensional menuju keamanan manusia, yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk bidang kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan hubungan antara masyarakat dan TNI, yang pada akhirnya membantu memudahkan tugas dalam melaksanakan penjagaan di perbatasan (Media Indonesia, 2020).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Lingkungan strategis adalah wilayah yang dapat mencicipakan peluang dan ancaman dari negara-negara di sekitarnya. Ini dapat mencakup keamanan bernegara yang menekankan pentingnya analisis bidang politik dan militer. Sementara itu, lingkungan strategis Indonesia di Pulau Miangas yang merupakan pulau terluar Indonesia di bagian utara dan wilayah perbatasan Indonesia, kini telah menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah. Terlebih lagi sejak adanya prinsip Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Prinsip tersebut telah mengembangkan postur pertahanan lingkungan perbatasan antar negara tetangga Indonesia, khususnya Filipina yang berdekatan dengan Pulau Miangas.

Pemerintah juga telah melihat ancaman-ancaman berupa kekhawatiran Indonesia akan perubahan orientasi warga Miangas, dan peluang berupa destinasi baru untuk pariwisata Indonesia. Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan pulau terluar Indonesia sebagai beranda negara. Selain

itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan pengembangan di wilayah perbatasan utara tersebut untuk melindungi dan menjaga lingkungan strategis Indonesia baik dalam aspek militer, politik, ekonomi dan sosial demi memenuhi kepentingan nasional Indonesia.

Diperlukannya penanaman dan pengenalan mendalam atas Pancasila kepada Masyarakat karena masyarakat merupakan salah satu pembangun dan pemersatu suatu negara. Kegiatan untuk mengajak Masyarakat di sana untuk memperkuat budaya Indonesia seperti penggunaan Bahasa dan mata uang Indonesia merupakan langkah kecil tetapi berdampak besar. Jika pandangan Masyarakat Miangas sudah bersatu dan sudah memilih Indonesia sebagai jati dirinya, maka kepentingan nasional dapat diwujudkan bersama-sama. Daerah harus diperlakukan sama seperti daerah kedaulatan Republik Indonesia dimana seluruh sumber daya harus dijaga dan hak-hak masyarakat di dalamnya harus diperjuangkan sesuai dengan Ideologi negara, Pancasila.

## REFERENSI

- Banjarnahor, Sulaeman. 2013. Teori Perkembangan Lingkungan Strategis dalam "Optimalisasi Pemenuhan Alutsista TNI Guna Mewujudkan Minimum Essential Force (MEF) dalam Rangka Ketahanan Nasional". [Online]. Perpustakaan Lemhannas RI. Diakses melalui <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010011600000000247/swf/5658/files/basichtml/page2.html> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Cohen, S.B. 2001. *Geopolitics dalam International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Elsevier.
- Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2022. Miangas. [Online]. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses melalui [http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/pulau\\_info/306](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/306) pada tanggal 26 Februari 2022.
- Ikanubun, Yoseph. 2017. Miangas Pulau Menangis Yang Jadi Rebutan 3 Negara. [Online]. Liputan 6. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/2982944/miangas-pulau-menangis-yang-jadi-rebutan-3negara> pada tanggal 26 Februari 2022.

- Media Indonesia 2020. Miangas, Pulau Paling Utara di Perbatasan Indonesia-Filipina. [Online]. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/infografis/358235/miangas-pulau-paling-utara-di-perbatasan-indonesia-filipina> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Media Indonesia. 2020. Peran TNI AL di Tapal Batas Pulau Miangas. [Online]. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/humaniora/366654/peran-tni-al-di-tapal-batas-pulau-miangas> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2012. Menilik Perbatasan Indonesia-Filipina: Pulau Miangas. Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Rumah Belajar. 2022. Pulau Miangas. [Online]. Kemdikbud. Diakses melalui [https://petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id/Repositorys/pulau\\_miangas/](https://petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id/Repositorys/pulau_miangas/) pada tanggal 26 Februari 2022.
- Samosir, Hanna Azarya. 2017. RI Sahkan Persetujuan Batas ZEE dengan Filipina. [Online]. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170427183203-106-210723/ri-sahkan-persetujuan-batas-zee-dengan-filipina> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Santoso, Arif Setyabudi. 2016. Pulau Miangas Sempat Jadi Perebutan dengan Filipina, Begini Keindahan Pulau Terluar Indonesia. [Online]. Diakses melalui <http://travel.tribunnews.com/2016/11/21/pulau-miangas-sempat-jadi-perebutan-dengan-filipina-begini-keindahan-pulau-terluar-indonesia?page=2> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Yayasan BUMN. 2020. Miangas, Tak Perlu “Menangis” Lagi. [Online]. Diakses melalui <http://yayasanbumn.org/miangas-pulau-menangis-di-sulawesi-utara-yang-tidak-perlu-menangis-lagi.html> pada tanggal 26 Februari 2022.